

Analisis Kinerja Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan

Serpiana Bunga⁽¹⁾

Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Kristian Hoegh Pride Lambe⁽²⁾

Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Baharuddin⁽³⁾

Program Studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Email korespondensi:

serpianabunga80@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the financial accountability performance of the South Papua Provincial Inspectorate as an internal oversight body. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving ten key informants. The research focuses on financial reporting effectiveness, internal control implementation, and influencing factors.

Findings reveal that while improvements have occurred in reporting compliance, accountability performance remains limited due to insufficient human resources, weak internal controls, and underutilized information systems. Efforts such as auditor training and SOP development have been initiated but require stronger institutional support.

The study highlights the need for capacity building, digital oversight tools, and risk-based audit practices to enhance financial accountability in newly formed regions. These insights offer practical implications for strengthening public financial governance.

Keywords: Financial accountability; inspectorate; internal audit; public financial governance; South Papua.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kinerja akuntabilitas keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terhadap sepuluh informan kunci. Fokus penelitian mencakup efektivitas pelaporan keuangan, penerapan sistem pengendalian intern, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam kepatuhan pelaporan, kinerja akuntabilitas masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengendalian, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Upaya seperti pelatihan auditor dan penyusunan SOP telah dilakukan, namun masih memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas, digitalisasi pengawasan, dan penerapan audit berbasis risiko untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah otonomi baru. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi perbaikan tata kelola keuangan publik.

Kata kunci: Akuntabilitas keuangan; inspektorat; pengawasan internal; tata kelola keuangan; Papua Selatan.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas menjadi landasan bagi transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik yang dibiayai oleh dana negara. Pemerintah daerah sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan kegiatan keuangannya kepada masyarakat, lembaga pengawas, dan otoritas yang berwenang ⁽¹⁾. Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ^(2,3).

Inspektorat Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu lembaga baru yang bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, dan audit terhadap seluruh aktivitas keuangan di lingkungan pemerintah provinsi. Sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Selatan dihadapkan pada tantangan unik, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), rendahnya infrastruktur teknologi informasi, serta keterlambatan pembentukan sistem dan prosedur kerja yang terstandarisasi ⁽⁴⁾. Hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal dan tindak lanjut hasil audit yang belum optimal, yang berpotensi menurunkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan ⁽⁴⁾.

Menurut Setiawati dkk ⁽⁵⁾, penerapan prinsip good governance—yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas—menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan institusi sektor publik. Dalam praktiknya, akuntabilitas keuangan yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem pengendalian intern yang kuat, pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, serta kapasitas aparatur yang kompeten. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia, yang belum maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip ini ⁽⁶⁾.

Dalam kasus Inspektorat Provinsi Papua Selatan, penguatan sistem pengendalian intern, pelaporan berbasis kinerja, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi tantangan utama dalam memastikan kinerja akuntabilitas keuangan yang optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya akuntabilitas antara lain: terbatasnya SDM auditor yang kompeten, kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan, dan masih minimnya integrasi sistem informasi dalam proses pengawasan dan pelaporan ^(7,8). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal mampu menjawab tantangan tersebut dalam upaya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Potensi kekayaan daerah yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Papua Selatan pada masa depan. Sebagai salah satu Provinsi Papua Selatan yang ada di Indonesia yang juga memiliki permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Selatan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. APBD Inspektorat Provinsi Papua Selatan (Tahun 2023-2024)

No	TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN (Rp. Milyar)	REALISASI (Rp. Milyar)	PRESENTASE %
1	2023	16.179.101.415	11.300.582.811	69,84
2	2024	17.500.000.000	Sementara berjalan	
	Total	33.679101.415	Kegiatan masih sementara berjalan	

Sumber: Data APBD Kabupaten Toraja Utara (2024)

Tabel 1 Menunjukkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Provinsi Papua Selatan menunjukan bahwa:

1. Pada tahun 2023 pendapatan Rp16.179.101.415,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp11.300.582.811 atau 69.84 persen.
2. Pada tahun 2024 pendapatan Rp17.500.000.000,- dengan realisasi Anggaran pada saat penelitian dilakukan, masih sementara berjalan. Anggaran Inspektorat Provinsi Papua Selatan selama dua (2) tahun hanya mencakup belanja langsung karena Belanja Tidak langsung (gaji dan Tambahan Penghasilan) masih melekat pada Badan Pengelolaan Pendapatan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dengan adanya perubahan anggaran dari tahun 2023 ke Tahun 2024 pada kantor Inspektorat Provinsi Papua Selatan dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun kedepan relatif berbeda. Anggaran Inspektorat Provinsi Papua Selatan merupakan alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan untuk mendukung Operasional, Program, dan kegiatan Inspektorat. Inspektorat Provinsi Papua Selatan sendiri bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilingkungan pemerintahan provinsi Papua Selatan guna memastikan transparansi, akuntabilitas, efektifitas penggunaan anggaran serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan Provinsi Papua Selatan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan

Penelitian ini menjadi penting mengingat peran strategis Inspektorat dalam membentuk budaya akuntabilitas di tingkat daerah, terlebih di provinsi baru seperti Papua Selatan yang sedang membangun sistem kelembagaan dari awal. Evaluasi terhadap kinerja akuntabilitas keuangan di lembaga ini tidak hanya akan memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas pengawasan internal, tetapi juga menjadi pijakan untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam pembentukan kebijakan daerah, penguatan APIP, serta pengembangan sistem pengendalian intern yang adaptif terhadap tantangan daerah tertinggal dan perbatasan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja akuntabilitas keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja akuntabilitas keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja daerah, baik dari aspek transparansi pelaporan, efektivitas sistem pengendalian intern, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja akuntabilitas keuangan, baik faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan struktur organisasi, maupun faktor eksternal seperti dinamika regulasi, koordinasi antarinstansi, dan tantangan geografis khas daerah otonomi baru.
3. Mengevaluasi upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, termasuk implementasi pelatihan auditor, penerapan teknologi informasi dalam pengawasan, serta penguatan sistem pelaporan dan tindak lanjut audit.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Utama (Grand Theory): Teori Akuntabilitas Publik

Penelitian ini berlandaskan pada teori akuntabilitas publik sebagai kerangka konseptual utama (grand theory). Akuntabilitas publik menekankan pentingnya keterbukaan, transparansi, dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan sumber daya publik ⁽⁹⁾. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti Inspektorat Daerah, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana lembaga

tersebut mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, tindakan, serta hasil kinerjanya kepada masyarakat dan lembaga pengawas yang berwenang ⁽¹⁰⁾.

Teori ini mendasari pandangan bahwa institusi publik yang menjalankan fungsi pengawasan, seperti Inspektorat, harus mempertahankan legitimasi melalui mekanisme pelaporan keuangan yang transparan, penerapan sistem pengendalian intern yang kuat, dan kepatuhan terhadap norma serta regulasi ⁽¹¹⁾. Dalam pendekatan Bovens ⁽⁹⁾, akuntabilitas mencakup tiga elemen penting: informasi, penjelasan, dan sanksi, yang menjadi tolok ukur keberhasilan fungsi pengawasan dalam sistem demokrasi.

Perspektif Konseptual Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif, studi ini berpijak pada asumsi konstruktivisme, yang memandang bahwa realitas sosial bersifat majemuk, dinamis, dan dibentuk oleh interaksi antar pelaku ⁽¹²⁾. Dengan demikian, pemahaman terhadap kinerja akuntabilitas keuangan tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal, pengalaman subyektif informan, serta dinamika kelembagaan di Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta praktik yang berkembang dalam pengawasan keuangan, bukan hanya mengukur kinerja secara kuantitatif.

Dalam kerangka ini, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup upaya institusional dalam membangun budaya pengawasan, merespons hasil audit, serta menciptakan sistem yang memungkinkan transparansi dan partisipasi.

Definisi Operasional Konsep-Konsep Kunci

Beberapa konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- **Akuntabilitas Keuangan:** Merupakan kewajiban lembaga publik untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik dan otoritas pengawas ⁽¹³⁾. Dalam konteks ini, akuntabilitas keuangan diukur melalui indikator transparansi laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas tindak lanjut audit, dan integritas pengelolaan anggaran.
- **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):** Didefinisikan sebagai proses integral dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi ⁽¹⁴⁾. SPIP mencakup komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- **Kinerja Inspektorat:** Dalam konteks ini, kinerja diartikan sebagai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, kualitas temuan audit, serta kemampuan mendorong perbaikan tata kelola keuangan OPD ⁽¹⁵⁾.
- **Good Governance:** Merupakan prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan ⁽⁵⁾. Penerapan prinsip ini menjadi prasyarat dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Literatur Terkait dan Relevansi Empiris

Penelitian-penelitian terdahulu memberikan pijakan penting bagi studi ini. Tome dkk. ⁽¹⁶⁾ menemukan bahwa kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Djasuli ⁽¹⁷⁾ juga menunjukkan bahwa kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor krusial dalam efektivitas pengawasan internal di daerah-daerah baru.

Studi terbaru dari Sisilia Essing ⁽¹⁸⁾ mengungkap bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam opini laporan keuangan, namun akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai akibat belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi audit dan lemahnya koordinasi antar unit kerja. Hasil evaluasi ⁽⁴⁾ juga menunjukkan bahwa provinsi baru seperti Papua Selatan memerlukan penguatan kelembagaan Inspektorat dalam mendukung transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

Dengan demikian, literatur terkini mengafirmasi pentingnya sinergi antara kapasitas kelembagaan, dukungan sistem informasi, dan budaya kerja yang akuntabel sebagai prasyarat keberhasilan fungsi pengawasan keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus^(19,20), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kinerja akuntabilitas keuangan pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan proses yang terjadi secara natural di lingkungan organisasi yang menjadi subjek penelitian. Menurut Sugiyono⁽²⁰⁾, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial melalui perspektif para pelaku dalam konteks yang spesifik dan kompleks. Studi kasus dipilih karena objek penelitian berfokus pada satu institusi, yaitu Inspektorat Provinsi Papua Selatan, yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam dan menyeluruh terhadap unit analisis.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pejabat struktural dan fungsional yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Mengingat pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih berdasarkan posisi strategis, keterlibatan langsung dalam proses audit internal, dan pengetahuan yang memadai mengenai sistem pengendalian dan akuntabilitas keuangan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang, terdiri dari pimpinan struktural seperti Inspektur, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu; auditor fungsional; staf keuangan; tim tindak lanjut audit; serta kepala subbagian umum dan kepegawaian.

Lokasi penelitian ini adalah kantor Inspektorat Provinsi Papua Selatan, yang terletak di Merauke sebagai pusat pemerintahan provinsi baru hasil pemekaran. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi penguatan sistem pengawasan keuangan di daerah otonomi baru yang memiliki tantangan khusus dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem kelembagaan. Penelitian dilakukan selama dua bulan, yaitu pada rentang waktu Januari hingga Februari 2025, yang mencakup proses wawancara mendalam, observasi aktivitas kelembagaan, dan telaah dokumentasi internal.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dari berbagai perspektif informan. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi kerja, proses pengawasan, dan dinamika pelaporan keuangan di lapangan. Sementara itu, dokumentasi mencakup analisis terhadap laporan hasil audit, laporan kinerja tahunan, laporan realisasi anggaran, dan dokumen pelatihan auditor. Triangulasi sumber data dilakukan untuk meningkatkan keabsahan temuan, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña⁽²¹⁾, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyortir, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah menjadi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks tematik untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar konsep. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi atas pola yang muncul, disertai proses verifikasi melalui triangulasi dan diskusi dengan informan kunci untuk menjamin validitas interpretasi. Dalam proses ini, peneliti juga menggunakan catatan lapangan, memo analitik, dan coding terbuka sebagai bagian dari strategi analisis tematik.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana Inspektorat Provinsi Papua Selatan menjalankan fungsi pengawasan dan membangun sistem akuntabilitas keuangan di tengah keterbatasan struktural dan institusional sebagai provinsi baru.

HASIL

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan kunci yang berasal dari berbagai posisi strategis di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Informan terdiri dari tiga orang pejabat struktural (Inspektur, Sekretaris, dan Inspektur Pembantu Wilayah I), tiga auditor fungsional (Auditor Madya dan PPUPD), dua staf keuangan, dua anggota tim tindak lanjut audit, serta satu kepala subbagian umum dan kepegawaian. Mayoritas informan telah bekerja di lingkungan Inspektorat lebih dari tiga tahun, dan beberapa memiliki pengalaman sebelumnya di lembaga pengawasan lain sebelum pemekaran provinsi.

Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang akuntansi dan administrasi publik. Namun, hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikasi audit seperti QIA (Qualified Internal Auditor), dan hal ini menjadi salah satu isu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil Analisis Temuan Lapangan

1. Kinerja Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan Inspektorat belum optimal, meskipun telah terjadi beberapa perbaikan dalam hal pelaporan dan pemantauan. Informan TW menyatakan bahwa *“akuntabilitas meningkat karena temuan audit berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi tindak lanjut masih sering lambat karena koordinasi antar unit belum solid.”*

Pelaporan anggaran dilakukan secara berkala dan sesuai siklus tahunan, namun belum seluruhnya berbasis kinerja. Sebagian laporan masih bersifat administratif dan belum terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi. Hal ini dikonfirmasi oleh informan HYL yang menyebut bahwa *“pelaporan keuangan tepat waktu, tetapi sistemnya belum bisa memantau realisasi anggaran secara real time.”*

Selain itu, sistem pengendalian intern belum berjalan maksimal. Beberapa elemen penting seperti SOP dan manajemen risiko belum terdokumentasi secara sistematis. Hal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan audit berbasis risiko yang efektif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Akuntabilitas Keuangan

Faktor internal paling dominan adalah keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis. Informan SADA dan AR menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan, karena *“kompetensi auditor menentukan kualitas rekomendasi pengawasan.”* Selain itu, terbatasnya sarana dan infrastruktur teknologi menjadi kendala dalam pelaporan dan pemantauan anggaran.

Dari sisi eksternal, dinamika regulasi, perubahan sistem pelaporan keuangan, serta koordinasi yang belum optimal dengan instansi lain seperti BPK dan BPKP turut memengaruhi kinerja pengawasan. Responden IPA mencatat bahwa *“ketika regulasi baru keluar, belum semua auditor memahami dengan cepat. Ini berdampak pada konsistensi audit.”*

3. Upaya Peningkatan Akuntabilitas oleh Inspektorat

Inspektorat Provinsi Papua Selatan telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

- Pelaksanaan pelatihan auditor dengan dukungan BPKP (seperti QIA dan audit investigatif).
- Penguatan koordinasi pengawasan dalam Rakorwasda.
- Implementasi sistem pelaporan berbasis teknologi informasi, meskipun masih dalam tahap awal.
- Penyusunan SOP internal untuk penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Namun, hambatan seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya literasi digital, serta lambatnya tindak lanjut atas hasil audit tetap menjadi isu utama dalam implementasi kebijakan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Inspektorat Provinsi Papua Selatan telah berupaya membangun sistem akuntabilitas keuangan yang memadai, namun pencapaian yang diperoleh belum sepenuhnya ideal. Temuan ini konsisten dengan teori akuntabilitas publik (Bovens, 2007; Romzek & Dubnick, 1987), yang menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial dalam menjamin transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.

Kinerja akuntabilitas keuangan yang belum optimal ditandai dengan rendahnya efektivitas sistem pengendalian intern dan kurangnya integrasi sistem informasi. Hal ini memperkuat temuan Tome et al. ⁽¹⁶⁾, yang menyebutkan bahwa kompetensi SDM dan penguatan sistem pengendalian menjadi faktor kunci dalam peningkatan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Ketergantungan pada laporan administratif tanpa pendekatan berbasis hasil (outcome-based reporting) juga menjadi penghambat pengukuran kinerja secara objektif.

Lebih lanjut, keterbatasan teknologi informasi menghambat akurasi dan kecepatan dalam proses audit serta pelaporan. Padahal, dalam era digital, transparansi dan efisiensi pelaporan publik sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang terintegrasi ⁽⁷⁾. Kurangnya literasi digital dan infrastruktur mendukung menurunnya daya saing kelembagaan di daerah otonomi baru seperti Papua Selatan.

Dari sisi upaya peningkatan, langkah-langkah Inspektorat untuk meningkatkan kapasitas auditor dan memperkuat koordinasi pengawasan menunjukkan arah yang progresif. Namun, masih diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi berupa peningkatan anggaran pengawasan, digitalisasi audit, serta sistem evaluasi berbasis risiko dan hasil audit. Prinsip good governance seperti responsivitas, transparansi, dan partisipasi publik juga perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah ⁽⁵⁾.

Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab ketiga rumusan masalah: menggambarkan kondisi kinerja akuntabilitas keuangan saat ini, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya, serta mengevaluasi strategi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Penelitian ini memberi kontribusi pada perumusan kebijakan pengawasan di daerah otonomi baru, sekaligus memperkaya literatur tentang akuntabilitas keuangan sektor publik di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja akuntabilitas keuangan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan di Inspektorat telah menunjukkan kemajuan dalam hal pelaporan dan kepatuhan terhadap siklus anggaran, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Faktor utama yang memengaruhi kinerja akuntabilitas keuangan adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem pengendalian intern, serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih bersifat parsial. Meskipun pelaporan anggaran dilakukan secara berkala, sistem belum mendukung monitoring dan evaluasi berbasis kinerja secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada lambatnya tindak lanjut atas hasil audit serta keterbatasan dalam pelacakan efisiensi penggunaan anggaran. Inspektorat telah melakukan beberapa langkah peningkatan, seperti pelatihan auditor, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan SOP pengawasan. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut masih perlu ditopang oleh komitmen kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran, dan transformasi digital yang terintegrasi. Penerapan prinsip good governance belum sepenuhnya berjalan konsisten, terutama pada aspek transparansi dan efektivitas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan keuangan tidak hanya bergantung pada struktur dan aturan, tetapi sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur dan sistem pendukung yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, strategi peningkatan kinerja Inspektorat perlu diarahkan pada penguatan institusi, pembinaan sumber daya manusia, serta penerapan sistem informasi yang mendukung pengawasan berbasis risiko dan hasil (outcome-based supervision).

Dengan demikian, tujuan penelitian telah tercapai, yaitu menggambarkan kinerja akuntabilitas keuangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, dan mengevaluasi upaya strategis yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan di daerah otonomi baru dalam merancang kebijakan pengawasan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan institusional, karena hanya berfokus pada satu lembaga, yaitu Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak memungkinkan generalisasi hasil secara luas, meskipun mampu menggali pemahaman kontekstual secara mendalam. Keterbatasan data kuantitatif dan kurangnya dokumentasi sistematis dari lembaga juga menjadi tantangan dalam triangulasi beberapa temuan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antar inspektorat di beberapa provinsi, khususnya antara provinsi baru dan provinsi maju, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kinerja akuntabilitas. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan pendekatan campuran (mixed methods) untuk menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif dan kualitatif, serta memanfaatkan data longitudinal untuk menilai perubahan kinerja dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo D, Barnes P, Sakurai Y. Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges. *Proc Contemp Issues Public Manag Twelfth Annu Conf Int Res Soc Public Manag (IRSPM XII)* [Internet]. 2008;1–36. Available from: <https://eprints.qut.edu.au/15321/1/15321.pdf>
2. Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 2017;(1605):1–17. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111467/permendagri-no-107-tahun-2017>
3. Mangallo E, Baharuddin, Lambe KHP. EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC J Ekon Holistik* [Internet]. 2025;1(1):108–15. Available from: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 [Internet]. Jakarta; 2022. Available from: <https://www.bpk.go.id/ihps>
5. Setiawati L, Todingbua MA, Halik JB. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Sci J Econ Manag Business, Account*. 2025;15(1):141–55.
6. Roreng PP, Bandhaso M, Tandirerung CJ. Competency Analysis of Human Resources and the Use of Information Technology on the Quality of Financial Reports in the Local Government of the City of Makassar. *WSEAS Trans Bus Econ* [Internet]. 2021;18(113):1218–22. Available from: <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.113>
7. Sanggalangi AD, Rantererung CL, Halik JB. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC J Ekon Holistik* [Internet]. 2025;1(1):86–92. Available from: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
8. Paembonan R, Ma'na P, Halik J. Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *J Mark Manag Innov Bus Rev*. 2024;2(2):1–6.
9. Bovens M, Goodin RE, Schillemans T. *The Oxford handbook of public accountability* [Internet]. New York: Oxford University Press; 2021. Available from: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>

10. Zumofen R. Public accountability : a summary analysis [Internet]. HAL Open Science. Lausanne; 2022. Report No.: hal-03623871. Available from: <https://hal.science/hal-03623871v1>
11. Lambe KHP, Palondongan E, Ma'na P, Tandil A. Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*. 2024;20(1):138–47.
12. Umanailo MCB. Paradigma Konstruktivis. 2019.
13. Jabar S, Frinaldi A, Roberia. Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang J Multidisiplin Ilmu*. 2024;2(12):720–8.
14. Oba YDC, Randa F, Daud maiercherinra. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Paulus J og Res*. 2024 Feb;1(1).
15. Pini L, Rantererung CL, Pasae Y. Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *J Mark Manag Innov Bus Rev*. 2025;3(1):8–13.
16. Tome S, Yamin M, Zakaria N, Pasolo F, Sonjaya Y. Pengaruh Kompetensi Aparatur , Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua. *SEIKO J Manag Bus* [Internet]. 2023;6(2):217–37. Available from: <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6213/4150>
17. Djasuli M, Sholihah U. Analisis Pengembangan SDM Dan Efektifitas Kelayakan Teknologi Akuntansi Dalam Revolusi Society 5 . 0 : Inspektorat Bangkalan. *J-CEKI J Cendekia Ilm* [Internet]. 2025;4(4):2214–24. Available from: <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/download/9389/7557/22587>
18. Essing SA, Saerang DPE, Lambey L, Akutansi PM, Ekonomi F, Sam U. Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *E-Journal UNSRAT* [Internet]. 2025;4(2):118–28. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/download/15331/14881/30762>
19. Saputra MRA, et al. Metode Ilmiah dan Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Kepustakaan. Sidoarjo: Nizamia Learning Center; 2023. 93 p.
20. Sugiyono. Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2020. 1–234 p.
21. Miles MB, Huberman AM, Saldana J. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed. California: SAGE Publications Inc; 2014.